

**SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN TAHUN 2022
DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN**



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

Alamat : Jl. Sentot Ali Basa No. 006, Desa Jati Mudik, Kecamatan Pariaman Tengah

2021

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	2
D. Ruang Lingkup	2
BAB II SEKILAS TENTANG SPIP	3
A. Pengertian	3
B. Tujuan SPIP	3
C. Unsur-unsur SPIP	4
1. Lingkungan Pengendalian	4
2. Penilaian Risiko	4
3. Kegiatan Pengendalian	4
4. Informasi dan Komunikasi	5
5. Pemantauan Berkelanjutan	5
D. Pernyataan Tanggung Jawab (<i>Statement of Responsibilities</i>)	6
BAB III PENCIPTAAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN	7
A. Tujuan Penciptaan Lingkungan Pengendalian yang Baik	7
B. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini	7
C. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian	8
BAB IV RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN	9
A. Pernyataan Tujuan	9
B. Risiko-risiko	10
C. Kegiatan Pengendalian Terpasang	12
D. Kegiatan Pengendalian yang Masih Dibutuhkan	13
BAB V INFORMASI DAN KOMUNIKASI	14
BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI	15
1. Pemantauan Berkelanjutan	15
2. Evaluasi Terpisah	15
3. Pelaksanaan Tindak lanjut	15
BAB VII PENUTUP	16
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai kelanjutan reformasi birokrasi di bidang keuangan negara dengan mengacu kepada Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara dan UU Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, serta untuk menciptakan good governance sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN, maka diperlukan sistem pengendalian intern dalam mengelola keuangan negara/ daerah. Mengingat pentingnya sistem pengendalian intern, selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan turunan dari UU Nomor 1 Tahun 2004 mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman, sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya menyelenggarakan SPIP. Didorong oleh kesadaran tersebut, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman telah, sedang, dan akan selalu menyelenggarakan SPIP. Agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu, diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman dalam rangka mengamankan upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
4. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 37 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.

C. Maksud dan Tujuan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman, sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman, yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Rencana tindak pengendalian dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman, dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/ penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman.

D. Ruang Lingkup

Rencana tindak pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman. Pelaksanaan rencana tindak pengendalian melibatkan seluruh jajaran pimpinan, tingkatan manajemen, pegawai, dan unit kerja di lingkungan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman. Realisasi atas rencana tindak pengendalian diharapkan dalam tahun 2022.

BAB II

SEKILAS TENTANG SPIP

A. Pengertian

Menurut Ketentuan Umum PP Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern (SPI) didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didefinisikan sebagai Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Definisi SPI dan SPIP di atas dipahami oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan aset negara/ daerah yang diamanatkan kepada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman, menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/fraud, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

B. Tujuan SPIP

Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

C. Unsur-unsur SPIP

Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut.

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Membangun lingkungan pengendalian memiliki arti membangun dan menciptakan suatu “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif. Lingkungan pengendalian yang baik merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman.

Lingkungan pengendalian akan efektif bila suatu lingkungan dengan orang-orang yang berkompeten memahami tanggung jawab dan batasan kewenangannya, memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki kesadaran yang penuh dan komitmen untuk melakukan apa yang benar dan yang seharusnya dengan mematuhi kebijakan dan prosedur organisasi berikut standar etika dan perilaku. Peranan pimpinan dalam mewujudkan suatu lingkungan pengendalian yang baik sangat penting karena pimpinan berperan sebagai tone at the top (penentu “irama” organisasi).

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko. Penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan.

Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pengendalian :

- Diutamakan pada kegiatan/tujuan pokok Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman;
- Dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
- Disesuaikan dengan sifat khusus Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman;
- Ditetapkan dengan kebijakan dan prosedur secara tertulis;
- Dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan; serta
- Dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan eksistensi kegiatan pengendalian.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan kegiatan instansi. Informasi dan komunikasi mencakup pengumpulan dan penyajian informasi kepada pegawai agar mereka dapat melakukan tanggung-jawabnya, termasuk pemahaman akan peran dan tanggung-jawabnya sehubungan dengan pengendalian intern.

5. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan atas pengendalian intern di lingkungan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman pada dasarnya, dilaksanakan untuk memastikan apakah sistem pengendalian intern pada suatu instansi pemerintah telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan apakah perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

D. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)

Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 mengamanatkan Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan. Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman memandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektifitas penyelenggaraan SPIP tersebut.

Rencana Tindak Pengendalian merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dan pernyataan pimpinan mengenai kondisi SPIP. Hal ini disebabkan sejauhmana realisasi atas Rencana Tindak Pengendalian menunjukkan sejauhmana pengendalian telah dijalankan.

BAB III

PENCIPTAAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

A. Tujuan Penciptaan Lingkungan Pengendalian yang Baik

Unsur lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lingkungan pengendalian yang baik/buruk menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya. Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif di lingkungan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman. Secara khusus, pembangunan lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman bertujuan untuk :

1. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
2. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
3. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
4. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
5. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
6. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.
7. Terwujudnya aparat pengawasan intern pemerintah yang berperan efektif; dan
8. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

B. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman, diperoleh gambaran sebagai berikut :

No	Sub Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Tidak Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Cukup Memadai
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Cukup Memadai
4	Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Cukup Memadai
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	Cukup Memadai
6	Kebijakan Pengembangan SDM	Cukup Memadai
7	Pengawasan Internal yang Efektif	Cukup Memadai
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah	Cukup Memadai

C. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Atas kelemahan lingkungan pengendalian yang ada saat ini, langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan adalah sebagai berikut.

No	Sub Unsur	Rencana Tindak Perbaikan/ Penguatan Lingkungan Pengendalian
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Memaksimalkan sosialisasi kode etik dan aturan perilaku organisasi di setiap apel pagi
2	Komitmen terhadap Kompetensi	-
3	Kepemimpinan yang Kondusif	-
4	Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	-
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	-
6	Kebijakan Pengembangan SDM	-
7	Pengawasan Internal yang Efektif	-
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah	-

BAB IV

RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN

A. Pernyataan Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam tahun 2022, rencana tindak pengendalian yang disusun Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman diprioritaskan untuk pembangunan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pada sub kegiatan sebagai berikut :

1. Tersusunnya dokumen NBM;
2. Terlaksananya sosialisasi B2SA;
3. Terlaksananya Pemantauan Stok dan Harga Pangan;
4. Terlaksananya Pendampingan Kelembagaan Distribusi Pangan;
5. Terlaksananya Pendampingan Kelembagaan Toko Tani Indonesia Kota Pariaman;
6. Tersusunnya dokumen laporan PPH;
7. Terlaksananya Pembinaan Pekarangan Pangan Lestari (P2L);
8. Tersusunnya dokumen FSVA;
9. Terlaksananya Rakor Dewan Ketahanan Pangan;
10. Terlaksananya Penanganan Kerawanan Pangan Daerah;
11. Terlaksananya Pengujian Sampel Pangan;
12. Terlaksananya Penyediaan Benih Padi Unggul dan Pengembangan Jagung;
13. Operasional Brigade Alsintan;
14. Tersusunnya Peta LP2B;
15. Terlaksananya Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
16. Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Prasarana dan Sarana Pendukung Pertanian;
17. Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Prasarana dan Sarana Pendukung Pertanian;
18. Tersusunnya buku statistik Perikanan Tangkap;
19. Terlaksananya pengadaan Bibit Restocking;
20. Tercapainya Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil;

21. Terjaminnya ketersediaan sarana pembudidaya ikan;
22. Terlaksananya penyediaan sarana pembudidaya ikan;
23. Terlaksananya Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil;
24. Terlaksananya Peningkatan populasi ternak;
25. Terlaksananya pendistribusian ternak ayam buras kepada masyarakat/peternak;
26. Terlaksananya sosialisasi penyakit Rabies;
27. Terlaksananya pengawasan pemotongan hewan ternak;
28. Terlaksananya pengadaan lahan RPH.

B. Risiko-risiko

Berdasarkan hasil penilaian atas risiko yang mengancam pencapaian tujuan pada sub kegiatan, terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas untuk ditanganani. Risiko-risiko dimaksud meliputi risiko yang teridentifikasi berdasarkan permasalahan yang ditemukan oleh pihak auditor dan risiko yang teridentifikasi melalui diskusi manajemen, yaitu :

Risiko atas pencapaian Tujuan 1 :

- Kurangnya informasi harga pangan dan neraca bahan makanan

Risiko atas pencapaian Tujuan 2 :

- Rendahnya jumlah masyarakat yang menghadiri sosialisasi B2SA

Risiko atas pencapaian Tujuan 3 :

- Kurangnya informasi Pemantauan Stok dan Harga Pangan

Risiko atas pencapaian Tujuan 4 :

- Rendahnya jumlah masyarakat yang ikut Pendampingan Kelembagaan Distribusi Pangan

Risiko atas pencapaian Tujuan 5 :

- Rendahnya jumlah masyarakat yang ikut Pendampingan Kelembagaan Toko Tani

Risiko atas pencapaian Tujuan 6 :

- Kurangnya data informasi dokumen laporan

Risiko atas pencapaian Tujuan 7 :

- Rendahnya jumlah masyarakat yang ikut pembinaan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)

Risiko atas pencapaian Tujuan 8 :

- Kurang lengkapnya dokumen laporan PPH

Risiko atas pencapaian Tujuan 9 :

- Kurangnya jumlah peserta rakor Dewan Ketahanan pangan daerah

Risiko atas pencapaian Tujuan 10 :

- Jumlah penerima kerawanan pangan tidak terpenuhi

Risiko atas pencapaian Tujuan 11 :

- Kurang tersedianya sarana dan prasarana pengujian Sampel Pangan

Risiko atas pencapaian Tujuan 12 :

- Kurang tersedianya jumlah benih

Risiko atas pencapaian Tujuan 13 :

- Kurangnya jumlah alsintan yang tersedia

Risiko atas pencapaian Tujuan 14 :

- Kurangnya data dan informasi LP2B

Risiko atas pencapaian Tujuan 15 :

- Jumlah Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang terlalu banyak

Risiko atas pencapaian Tujuan 16 :

- Rendahnya jumlah masyarakat yang ikut Pendampingan Penggunaan Prasarana dan Sarana Pendukung Pertanian

Risiko atas pencapaian Tujuan 17 :

- Rendahnya jumlah masyarakat yang ikut Pendampingan Penggunaan Prasarana dan Sarana Pendukung Pertanian

Risiko atas pencapaian Tujuan 18 :

- Kurangnya data dan informasi sumber daya ikan

Risiko atas pencapaian Tujuan 19 :

- Tingginya biaya operasional

Risiko atas pencapaian Tujuan 20 :

- Nelayan yang tidak sesuai jalur/alur penangkapan ikan

Risiko atas pencapaian Tujuan 21 :

- Kematian ikan skala besar

Risiko atas pencapaian Tujuan 22 :

- Penurunan kualitas lingkungan budidaya

Risiko atas pencapaian Tujuan 23 :

- Terbatasnya akses permodalan bagi pelaku usaha perikanan

Risiko atas pencapaian Tujuan 24 :

- Kematian ternak skala besar

Risiko atas pencapaian Tujuan 25 :

- Kurang tersedianya jumlah ayam buras

Risiko atas pencapaian Tujuan 26 :

- Rendahnya jumlah masyarakat yang menghadiri sosialisasi penyakit Rabies

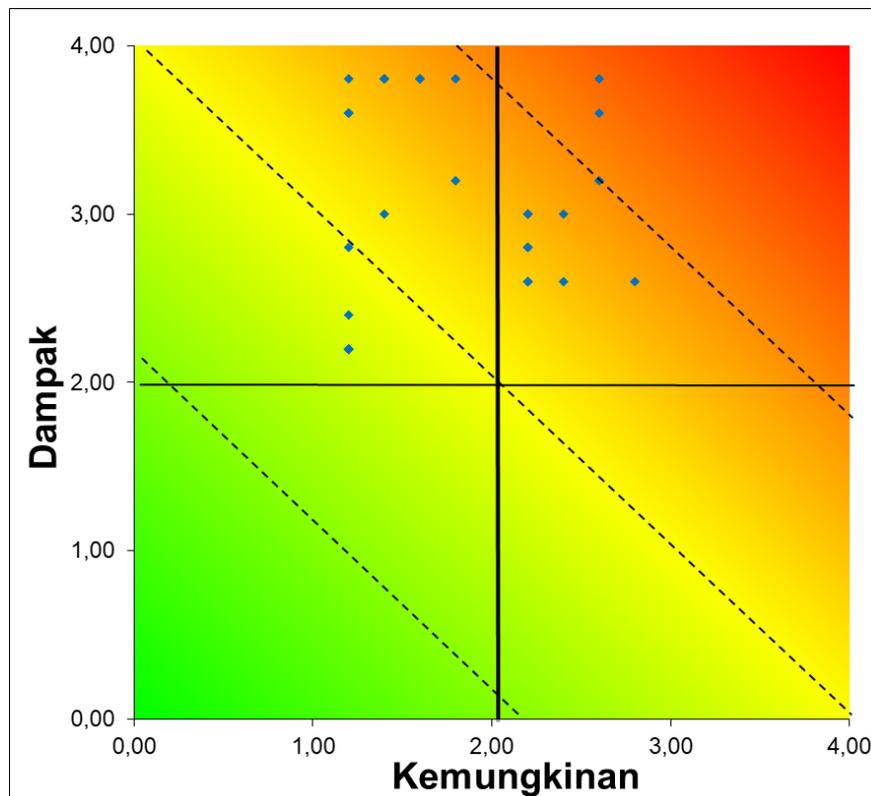
Risiko atas pencapaian Tujuan 27 :

- Kurang terkontrolnya pengawasan pemotongan hewan ternak

Risiko atas pencapaian Tujuan 28 :

- Belum tersedianya lahan RPH

Hasil analisis atas risiko-risiko dimaksud memperlihatkan peta risiko sebagai berikut.



Rincian risiko teridentifikasi tertuang dalam **lampiran 1**.

C. Kegiatan Pengendalian Terpasang

Sampai dengan saat ini, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman telah membangun berbagai pengendalian. Beberapa pengendalian dinilai telah efektif namun beberapa lainnya kurang/tidak efektif mengatasi risiko dalam upaya pencapaian tujuan. Pengendalian yang telah terpasang, antara lain adalah sebagai berikut.

- Laporan money;
- Teguran saat apel pagi.

D. Kegiatan Pengendalian yang Masih Dibutuhkan

Dalam rangka meningkatkan efektifitas penanganan risiko, beberapa kegiatan pengendalian yang telah ada perlu ditingkatkan dan beberapa kegiatan pengendalian baru perlu dibangun. Pembangunan kegiatan pengendalian didasarkan kepada upaya untuk mengurangi kemungkinan munculnya penyebab risiko dan upaya untuk mengurangi dampak apabila risiko benar-benar terjadi. Sebagian kegiatan pengendalian yang dibangun didasarkan kepada rekomendasi pihak auditor.

Kegiatan pengendalian yang masih perlu dibangun adalah sebagai berikut.

Risiko 1-28:

- Rencana tindak lanjut.

Rincian kegiatan pengendalian yang masih dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko tertuang dalam **lampiran 2**.

BAB V

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung berjalannya pengendalian yang dibangun. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi :

- Sosialisasi pada setiap apel pagi.

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam **lampiran 3**.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan meliputi :

1. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana seharusnya. masing-masing unit kerja OPD pemilik risiko membangun dan melaksanakan pemantauan berkelanjutan. Pemantauan berkelanjutan yang perlu dilakukan meliputi sebagai berikut.

- Monitoring dan evaluasi lanjutan;
- Laporan monev triwulan.

Pemantauan berkelanjutan atas pengendalian tertuang dan terintegrasi dalam kebijakan dan prosedur pengendalian.

2. Evaluasi Terpisah

Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman melaksanakan evaluasi atas penyelenggaraan SPIP pada unit-unit kerja strategis pada akhir tahun. Evaluasi bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif.

3. Pelaksanaan Tindak lanjut

Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas setiap rekomendasi hasil audit/evaluasi/reviu dari auditor eksternal maupun internal, setiap unit kerja OPD melaksanakan tindak lanjutnya.

4. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP

Setiap OPD memberikan laporan atas pelaksanaan RTP sesuai tanggungjawabnya secara berkala kepada tim pemantau. Hasil pemantauan tim pemantau dilaporkan kepada walikota.

BAB VII PENUTUP

Pemantauan atas pelaksanaan sesuai rencana tindak pengendalian ini dan evaluasi atas efektifitas pengendalian yang ada akan menjadi dasar pertimbangan pembuatan *Statement of Responsibility* dalam laporan keuangan.


Kepala Dinas

DASRIL, S.Sos
NIP. 19691219 199303 1 002

Lampiran 1. DAFTAR RISIKO PRIORITAS TERIDENTIFIKASI

No	Pernyataan resiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak pada Capaian Tujuan
1	2	3	4	5
1	Kurangnya informasi harga pangan dan neraca bahan makanan	Bidang Ketahanan Pangan	Petugas lapang yang kurang mengisi data	Terlaksananya Penyediaan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan
2	Rendahnya jumlah masyarakat yang menghadiri sosialisasi B2SA	Bidang Ketahanan Pangan	Kurangnya minat masyarakat akan sosialisasi B2SA	Terlaksananya Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya lokal
3	Kurangnya informasi Pemantauan Stok dan Harga Pangan	Bidang Ketahanan Pangan	Kurang optimalnya Pemantauan Stok dan Harga Pangan	Terlaksananya Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
4	Rendahnya jumlah masyarakat yang ikut Pendampingan Kelembagaan Distribusi Pangan	Bidang Ketahanan Pangan	Kurangnya kesadaran masyarakat akan Kelembagaan Distribusi Pangan	Terlaksananya Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan
5	Rendahnya jumlah masyarakat yang ikut Pendampingan Kelembagaan Toko Tani	Bidang Ketahanan Pangan	Kurangnya kesadaran masyarakat akan Kelembagaan Toko Tani	Terlaksananya Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia
6	Kurangnya data informasi dokumen laporan	Bidang Ketahanan Pangan	Petugas lapang yang kurang mengisi data	Terlaksananya Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun
7	Rendahnya jumlah masyarakat yang ikut pembinaan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)	Bidang Ketahanan Pangan	Kurangnya minat masyarakat untuk ikut pembinaan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)	Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal (DAK NF)
8	Kurang lengkapnya dokumen laporan PPH	Bidang Ketahanan Pangan	Petugas yang kurang lengkap melaporkan dokumen	Terlaksananya Penyusunan dan pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan
9	Kurangnya jumlah peserta rakor Dewan Ketahanan pangan daerah	Bidang Ketahanan Pangan	Kurangnya kesadaran peserta akan ketahanan pangan daerah	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kota

No	Pernyataan resiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak pada Capaian Tujuan
1	2	3	4	5
10	Jumlah penerima kerawanan pangan tidak terpenuhi	Bidang Ketahanan Pangan	Kurangnya stok kerawanan pangan	Terlaksananya Pelaksanaan pengadaan , pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah kota
11	Kurang tersedianya sarana dan prasarana pengujian Sampel Pangan	Bidang Ketahanan Pangan	Meningkatnya harga sarana dan prasarana pengujian Sampel Pangan	Terlaksananya Penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan Daerah Kota
12	Kurang tersedianya jumlah benih	Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah masyarakat penerima benih lebih banyak daripada benih yang disediakan	Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifikasi lokasi
13	Kurangnya jumlah alsintan yang tersedia	Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah masyarakat penerima lebih banyak daripada alsintan ang tersedia	Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
14	Kurangnya data dan informasi LP2B	Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Petugas lapang yang kurang melaporkan data LP2B	Terlaksananya Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B)
15	Jumlah Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang terlalu banyak	Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kurang tersedianya jumlah sarana prasarana pengendalian	Terlaksananya Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

No	Pernyataan resiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak pada Capaian Tujuan
1	2	3	4	5
16	Rendahnya jumlah masyarakat yang ikut Pendampingan Penggunaan Prasarana dan Sarana Pendukung Pertanian	Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kurangnya kesadaran masyarakat akan Pendampingan Penggunaan Prasarana dan Sarana Pendukung Pertanian	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
17	Rendahnya jumlah masyarakat yang ikut Pendampingan Penggunaan Prasarana dan Sarana Pendukung Pertanian	Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kurangnya kesadaran masyarakat akan Pendampingan Penggunaan Prasarana dan Sarana Pendukung Pertanian	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
18	Kurangnya data dan informasi sumber daya ikan	Bidang Perikanan dan Kelautan	Petugas lapang yang kurang mengisi data	Terlaksananya Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
19	Tingginya biaya operasional	Bidang Perikanan dan Kelautan	Belum optimalnya bantuan maupun subsidi	Terlaksananya Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
20	Nelayan yang tidak sesuai jalur/alur penangkapan ikan	Bidang Perikanan dan Kelautan	Jalur/alur penangkapan ikan yang kurang dimengerti dan dipahami oleh nelayan	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
21	Kematian ikan skala besar	Bidang Perikanan dan Kelautan	Munculnya wabah serangan penyakit pada ikan	Terlaksananya Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam satu Kab/Kota
22	Penurunan kualitas lingkungan budidaya	Bidang Perikanan dan Kelautan	Pencemaran lingkungan budidaya	Terlaksananya Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
23	Terbatasnya akses permodalan bagi pelaku usaha perikanan	Bidang Perikanan dan Kelautan	Masih rendahnya tingkat kepercayaan perbankan terhadap pelaku usaha perikanan	Terlaksananya Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

No	Pernyataan resiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak pada Capaian Tujuan
1	2	3	4	5
24	Kematian ternak skala besar	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Munculnya serangan wabah penyakit	Terlaksananya Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
25	Kurang tersedianya jumlah ayam buras	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah masyarakat lebih banyak daripada ternak ayam buras yang didistribusikan	Terlaksananya Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak
26	Rendahnya jumlah masyarakat yang menghadiri sosialisasi penyakit Rabies	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Kurangnya kesadaran masyarakat akan penyakit hewan menular	Terlaksananya Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota
27	Kurang terkontrolnya pengawasan pemotongan hewan ternak	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Kurangnya jumlah petugas	Terlaksananya Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan / atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan
28	Belum tersedianya lahan RPH	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Belum didapat lahan yang tepat	Terlaksananya Pengadaan RPH

Lampiran 2. RENCANA TINDAK PERBAIKAN KEGIATAN PENGENDALIAN

No	Pernyataan Resiko	Pengendalian yang masih dibutuhkan	Penanggung Jawab
1	2	3	4
1	Kurangnya informasi harga pangan dan neraca bahan makanan	Rencana tindak lanjut	Bidang Ketahanan Pangan
2	Rendahnya jumlah masyarakat yang menghadiri sosialisasi B2SA	Rencana tindak lanjut	Bidang Ketahanan Pangan
3	Kurangnya informasi Pemantauan Stok dan Harga Pangan	Rencana tindak lanjut	Bidang Ketahanan Pangan
4	Rendahnya jumlah masyarakat yang ikut Pendampingan Kelembagaan Distribusi Pangan	Rencana tindak lanjut	Bidang Ketahanan Pangan
5	Rendahnya jumlah masyarakat yang ikut Pendampingan Kelembagaan Toko Tani	Rencana tindak lanjut	Bidang Ketahanan Pangan
6	Kurangnya data informasi dokumen laporan	Rencana tindak lanjut	Bidang Ketahanan Pangan
7	Rendahnya jumlah masyarakat yang ikut pembinaan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)	Rencana tindak lanjut	Bidang Ketahanan Pangan
8	Kurang lengkapnya dokumen laporan PPH	Rencana tindak lanjut	Bidang Ketahanan Pangan
9	Kurangnya jumlah peserta rakor Dewan Ketahanan pangan daerah	Rencana tindak lanjut	Bidang Ketahanan Pangan
10	Jumlah penerima kerawanan pangan tidak terpenuhi	Rencana tindak lanjut	Bidang Ketahanan Pangan
11	Kurang tersedianya sarana dan prasarana pengujian Sampel Pangan	Rencana tindak lanjut	Bidang Ketahanan Pangan
12	Kurang tersedianya jumlah benih	Rencana tindak lanjut	Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
13	Kurangnya jumlah alsintan yang tersedia	Rencana tindak lanjut	Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
14	Kurangnya data dan informasi LP2B	Rencana tindak lanjut	Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

No	Pernyataan Resiko	Pengendalian yang masih dibutuhkan	Penanggung Jawab
1	2	3	4
15	Jumlah Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang terlalu banyak	Rencana tindak lanjut	Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
16	Rendahnya jumlah masyarakat yang ikut Pendampingan Penggunaan Prasarana dan Sarana Pendukung Pertanian	Rencana tindak lanjut	Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
17	Rendahnya jumlah masyarakat yang ikut Pendampingan Penggunaan Prasarana dan Sarana Pendukung Pertanian	Rencana tindak lanjut	Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
18	Kurangnya data dan informasi sumber daya ikan	Rencana tindak lanjut	Bidang Perikanan dan Kelautan
19	Tingginya biaya operasional	Rencana tindak lanjut	Bidang Perikanan dan Kelautan
20	Nelayan yang tidak sesuai jalur/alur penangkapan ikan	Rencana tindak lanjut	Bidang Perikanan dan Kelautan
21	Kematian ikan skala besar	Rencana tindak lanjut	Bidang Perikanan dan Kelautan
22	Penurunan kualitas lingkungan budidaya	Rencana tindak lanjut	Bidang Perikanan dan Kelautan
23	Terbatasnya akses permodalan bagi pelaku usaha perikanan	Rencana tindak lanjut	Bidang Perikanan dan Kelautan
24	Kematian ternak skala besar	Rencana tindak lanjut	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
25	Kurang tersedianya jumlah ayam buras	Rencana tindak lanjut	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
26	Rendahnya jumlah masyarakat yang menghadiri sosialisasi penyakit Rabies	Rencana tindak lanjut	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
27	Kurang terkontrolnya pengawasan pemotongan hewan ternak	Rencana tindak lanjut	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
28	Belum tersedianya lahan RPH	Rencana tindak lanjut	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Lampiran 3. RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENGENDALIAN

No	Tujuan yang Diidentifikasi	Pengendalian Yg Direncanakan	Bentuk/ Sarana Komunikasi	Penyedia Informasi
1	2	3	4	5
1	Tersusunnya dokumen NBM	Sosialisasi pada setiap apel pagi	Sosialisasi tatap muka	Bidang Ketahanan Pangan
2	Terlaksananya sosialisasi B2SA	Sosialisasi pada setiap apel pagi	Sosialisasi tatap muka	Bidang Ketahanan Pangan
3	Terlaksananya Pemantauan Stok dan Harga Pangan	Sosialisasi pada setiap apel pagi	Sosialisasi tatap muka	Bidang Ketahanan Pangan
4	Terlaksananya Pendampingan Kelembagaan Distribusi Pangan	Sosialisasi pada setiap apel pagi	Sosialisasi tatap muka	Bidang Ketahanan Pangan
5	Terlaksananya Pendampingan Kelembagaan Toko Tani Indonesia Kota Pariaman	Sosialisasi pada setiap apel pagi	Sosialisasi tatap muka	Bidang Ketahanan Pangan
6	Tersusunnya dokumen laporan PPH	Sosialisasi pada setiap apel pagi	Sosialisasi tatap muka	Bidang Ketahanan Pangan
7	Terlaksananya Pembinaan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)	Sosialisasi pada setiap apel pagi	Sosialisasi tatap muka	Bidang Ketahanan Pangan
8	Tersusunnya dokumen FSVA	Sosialisasi pada setiap apel pagi	Sosialisasi tatap muka	Bidang Ketahanan Pangan
9	Terlaksananya Rakor Dewan Ketahanan Pangan	Sosialisasi pada setiap apel pagi	Sosialisasi tatap muka	Bidang Ketahanan Pangan
10	Terlaksananya Penanganan Kerawanan Pangan Daerah	Sosialisasi pada setiap apel pagi	Sosialisasi tatap muka	Bidang Ketahanan Pangan
11	Terlaksananya Pengujian Sampel Pangan	Sosialisasi pada setiap apel pagi	Sosialisasi tatap muka	Bidang Ketahanan Pangan
12	Terlaksananya Penyediaan Benih Padi Unggul dan Pengembangan Jagung	Sosialisasi pada setiap apel pagi	Sosialisasi tatap muka	Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
13	Operasional Brigade Alsintan	Sosialisasi pada setiap apel pagi	Sosialisasi tatap muka	Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

No	Tujuan yang Diidentifikasi	Pengendalian Yg Direncanakan	Bentuk/ Sarana Komunikasi	Penyedia Informasi
1	2	3	4	5
14	Tersusunnya Peta LP2B	Sosialisasi pada setiap apel pagi	Sosialisasi tatap muka	Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
15	Terlaksananya Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	Sosialisasi pada setiap apel pagi	Sosialisasi tatap muka	Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
16	Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Prasarana dan Sarana Pendukung Pertanian	Sosialisasi pada setiap apel pagi	Sosialisasi tatap muka	Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
17	Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Prasarana dan Sarana Pendukung Pertanian	Sosialisasi pada setiap apel pagi	Sosialisasi tatap muka	Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
18	Tersusunnya buku statistik Perikanan Tangkap	Sosialisasi pada setiap apel pagi	Sosialisasi tatap muka	Bidang Perikanan dan Kelautan
19	Terlaksananya pengadaan Bibit Restocking	Sosialisasi pada setiap apel pagi	Sosialisasi tatap muka	Bidang Perikanan dan Kelautan
20	Tercapainya Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Sosialisasi pada setiap apel pagi	Sosialisasi tatap muka	Bidang Perikanan dan Kelautan
21	Terjaminnya ketersediaan sarana pembudidaya ikan	Sosialisasi pada setiap apel pagi	Sosialisasi tatap muka	Bidang Perikanan dan Kelautan
22	Terlaksananya penyediaan sarana pembudidaya ikan	Sosialisasi pada setiap apel pagi	Sosialisasi tatap muka	Bidang Perikanan dan Kelautan
23	Terlaksananya Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Sosialisasi pada setiap apel pagi	Sosialisasi tatap muka	Bidang Perikanan dan Kelautan
24	Terlaksananya Peningkatan populasi ternak	Sosialisasi pada setiap apel pagi	Sosialisasi tatap muka	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

No	Tujuan yang Diidentifikasi	Pengendalian Yg Direncanakan	Bentuk/ Sarana Komunikasi	Penyedia Informasi
1	2	3	4	5
25	Terlaksananya pendistribusian ternak ayam buras kepada masyarakat/peternak	Sosialisasi pada setiap apel pagi	Sosialisasi tatap muka	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
26	Terlaksananya sosialisasi penyakit Rabies	Sosialisasi pada setiap apel pagi	Sosialisasi tatap muka	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
27	Terlaksananya pengawasan pemotongan hewan ternak	Sosialisasi pada setiap apel pagi	Sosialisasi tatap muka	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
28	Terlaksananya pembangunan RPH	Sosialisasi pada setiap apel pagi	Sosialisasi tatap muka	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan